

**TELAAH IJIN HAKIM TERHADAP WALI DALAM PENJUALAN
TANAH MILIK ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

Sugiyarto¹ dan Sularto²

INTISARI

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis yang berjudul “Telaah Ijin Hakim Terhadap Wali Dalam Penjualan Tanah Milik Anak Di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” ini bertujuan untuk mengetahui diperlukan tidaknya Ijin Hakim atau Pengadilan dalam penjualan tanah milik anak di bawah umur yang dilakukan oleh walinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap *in person* atau yang bersangkutan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan apabila Ijin Hakim atau Pengadilan terhadap wali yang menjual tanah milik anak di bawah umur tidak diperlukan lagi dengan alasan dari sisi peraturan tidak jelas dasar hukumnya, dari sisi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menghambat tugas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dari sisi wali sangat memberatkan, dari sisi hakim tidak perlu ijin selama tidak ada pertentangan kepentingan antara wali dengan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Kata Kunci : Wali, Ijin Hakim, Jual Tanah.

¹. Ngijo RT 06/III, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

². Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

THE ANALIZE OF MAGISTERIAL WARRANT FOR THE TRUSTEE IN THE
SALES OF AN UNDERAGE CHILD'S LAND
AFTER THE ENACTION OF THE ACT NO.1 OF 1974

Sugiyarto¹ and Sularto²

ABSTRACT

To write this thesis, entitled 'The Analize of Magesterial Warrant for the Trustee in the Sales of an Underage Child's Land after the Enaction of the Act No. 1 of 1974', a research was conducted to assess the necessity of such a warrant in the trustee's sale of land which belongs to an underage child under the former's trusteeship.

To achieve this purpose, a library research and a field research were conducted. The library research was done by examining some documents, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The field research was conducted by personally interviewing the parties concerned.

Research results indicate that the court or magisterial warrant for the trustee in his sale of land which belongs to an underage child under his trusteeship is considered irrelevant for the following reasons. First, from the legal point of view, such a warrant does not have any clear legal basis. Second, from the point of view of the PPAT (Land Deed Officer), such a warrant will only hinder him in doing his job as a Land Deed Officer. Third, from the trustee's point of view, the obligation to obtain such a warrant will be too much of a burden to him. Fourth, from the point of view of the judge, such a warrant is unnecessary unless there is a conflict of interest between the trustee and the child under his trusteeship.

Keywords: *Trustee, Magisterial Warrant, Land Sales.*

¹ Ngijo RT 06/ III, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.